

**REKONSTRUKSI HUBUNGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA (DPD RI) DENGAN
PEMERINTAHAN DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

DISERTASI

Oleh

HANUGRA RYANTONI

2007190027



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**REKONSTRUKSI HUBUNGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA (DPD RI) DENGAN
PEMERINTAHAN DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

HANUGRA RYANTONI
2007190027



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanugra Ryantoni
NIM : 2007190027
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul
“REKONSTRUKSI HUBUNGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA (DPD RI) DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 12 Desember 2024



Hanugra Ryantoni
NIM: 2007190027



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

**REKONSTRUKSI HUBUNGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA (DPD RI) DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Oleh:

Nama : Hanugra Ryantoni
NIM : 2007190027
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Tertutup guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 12 Desember 2024

Menyetujui,

Promotor

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.

NIP/NIDK: 191690/9990463325

Co Promotor I

Dr. Maruarar Siahaan, S.H.
NIP/NIDK: 141126 /9903251632

Co Promotor II

Dr. Agustin Teras Narang, S.H., M.H.
NIP/NIDK: - / -



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Pada tanggal 12 Desember 2024 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Hanugra Ryantoni
NIM : 2007190027
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “REKONSTRUKSI HUBUNGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD RI) DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.	Ketua	1.
2	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	2.
3	Dr. Maruarar Siahaan, S.H.	Penguji	3.
4	Dr. Agustin Teras Narang, S.H., M.H.	Penguji	4.
5	Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H.	Penguji	5.
6	Dr. Manuel Kaisiepo, SIP., M.H.	Penguji	6.
7	Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.	Penguji Eksternal	7.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

LEMBAR PERSETUJUAN

**REKONSTRUKSI HUBUNGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA (DPD RI) DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Nama : Hanugra Ryantoni
NIM : 2007190027
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 12 Desember 2024

Mengesahkan,
Universitas Kristen Indonesia



Direktur Pascasarjana UKI

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A.
NIP/NIDN : 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hanugra Ryantoni
NIM : 2007190027
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Disertasi
Judul : REKONSTRUKSI HUBUNGAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
(DPD RI) DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 12 Desember 2024


Hanugra Ryantoni
NIM: 2007190027



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**SK PENGANGKATAN DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**



**Universitas Kristen Indonesia
Program Pascasarjana**

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Nomor: 1206/UKLPPS/HKP.03.01/2024

tentang:

**DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
SEMESTER GASAL TA 2024/2025
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam kegiatan Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia mensyaratkan disusunnya sebuah Disertasi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
 - b. bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Tahun Akademik 2020/2021 sudah saatnya untuk melaksanakan Ujian Terbuka;
 - c. bahwa untuk pengujian Ujian Terbuka tersebut perlu diangkat Dewan Pengujian yang mempunyai kewenangan dan kemampuan akademik.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
 4. Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.

- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;
- b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKIR/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA SEMESTER GASAL TA 2024/2025 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 06 Desember 2024



Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Tembusan:

1. Rektor UKI;
2. WRAI, WRSH, WRKP;
3. Kaprodi PDH;
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Nomor 1206/UKLPPS/HKP.03.01/2024
 Tanggal : 06 Desember 2024



**SUSUNAN DAN JADWAL DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
 PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
 SEMESTER GASAL TA 2024/2025**

No.	Hari / Tanggal	Waktu	Nama / NIM	Judul Disertasi	Dewan Penguji
1.	Kamis, 12 Desember 2024	13.00 - 15.00 WIB	Hamugra Ryantoni NIM. 2007190027	REKONSTRUKSI HUBUNGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD RI) DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. 2. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S. 3. Dr. Maruarar Siahan, S.H. 4. Dr. A. Teras Narang, S.H., M.H. 5. Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. 6. Dr. Manuel Kaisiepo, SIP., M.H. 7. Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
					Ketua Penguji Sekretaris / Promotor Penguji / Co Promotor 1 Penguji / Co Promotor 2 Penguji Penguji Penguji Eksternal (UPN Jakarta)

Mengetahui,
 Direktur Program Pascasarjana
 Universitas Kristen Indonesia

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
 NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Ketua Program Studi Hukum
 Program Doktor

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
 NIP./NIDK.: 191690/9990463325

Catatan:

- Kehadiran tepat waktu baik Dosen maupun Peserta Ujian Terbuka
- Dresscode: Baju Toga lengkap Peserta Ujian : Jas dan kemeja putih berdas

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhānahu wata‘ālā, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan bimbingan sehingga disertasi yang berjudul “*Rekonstruksi Hubungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dengan Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*” ini dapat diselesaikan. Proses panjang yang telah dilalui tidak hanya menjadi sebuah perjalanan akademik, tetapi juga pembelajaran hidup yang penuh makna bagi penulis. Selain itu, disertasi ini penulis susun guna memenuhi ujian terbuka Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Disertasi ini membahas upaya rekonstruksi hubungan antara DPD RI dan pemerintahan daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kajian ini berangkat dari dinamika yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya peran DPD RI sebagai representasi daerah dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional, serta interaksinya dengan pemerintahan daerah. Dalam negara besar yang beragam seperti Indonesia, harmoni antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan NKRI. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk lembaga DPD RI yang juga merupakan instansi tempat penulis bekerja.

Sungguh merupakan tantangan untuk mentransformasikan pemikiran ideal untuk disusun dalam sebuah disertasi. Berbagai dialektika yang muncul di tengah-tengah pusaran perdebatan begitu beragam dan coba diakomodasi dalam penulisan disertasi ini yang tentunya disusun dari sisi kajian akademis. Penulis menyadari bahwa penyusunan disertasi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Edward Sirait, S.E., Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI);
2. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI);
3. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A., Direktur Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia (UKI).;
4. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S., Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Kristen Indonesia (UKI), Promotor dan Ketua Penguji;
5. Dr. Maruarar Siahaan, S.H., Ko-Promotor I/Anggota Dewan Penguji;
6. Dr. A. Teras Narang, S.H., M.H., Ko-Promotor II/Anggota Dewan Penguji;
7. Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H, Anggota Dewan Penguji;
8. Dr. Manuel Kaisiepo, S.I.P, M.H., Anggota Dewan Penguji;
9. Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., Anggota Dewan Penguji;
10. Seluruh Dosen, Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Selain itu, Penulis juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan atas partisipasi dalam memberikan semangat, doa, dan dukungan moril yang berarti, yakni:

1. Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H., Ketua IKA PDH UKI/Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan dalam memberikan beasiswa dan dukungan yang luarbiasa bagi penulis;
2. Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI serta seluruh rekan-rekan di Sekretariat Jenderal DPD RI;
3. Rekan-rekan BP7: Mas Wachid, Mba Naning, om Dede, Bu Bani, mba Wiwid, dan kakak Rose;

4. Rekan-rekan di Tim Hukum di bawah asuhan Bapak Bambang Eko Suhariyanto, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.

Secara khusus, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Istri kami, Terry Ariefia, S.H.;
2. Anak-anak kami:
 - Ajwa Calista Azzahra;
 - Muhammad Khalid Anthony; dan
 - Muhammad Rayden Hasani.
3. Orang tua (dan mertua) kami:
 - Alm. Ayahnda Anton Tamarudin;
 - Ayahanda Shomad Hasani;
 - Ibunda Baiq Mar'atul Ullya; dan
 - Ibunda Nilawati.
4. Rekan dan sahabat penulis yang telah berpulang lebih dulu, alm. Dr (c) Andri Ardianto, S.H., M.H.;
5. Keluarga besar penulis; dan
6. pihak-pihak lain yang telah mendukung selesainya disertasi ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu

Perjalanan menyusun disertasi ini telah mengajarkan penulis arti kesabaran, ketekunan, dan pengorbanan. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap karya ini dapat menjadi langkah kecil menuju kontribusi yang lebih besar bagi negeri ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis

terbuka menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi dunia akademik, tetapi juga bagi semua pihak yang peduli terhadap DPD RI dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Semoga setiap usaha yang dilakukan, sekecil apa pun, menjadi bagian dari upaya menjaga persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bangsa..

Jakarta, Desember 2024

Hanugra Ryantoni
NIM. 2007190027



DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Karya Tugas Akhir	i
Persetujuan Tim Promotor	ii
Persetujuan Dewan Penguji	iii
Lembar Pengesahan	iv
Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir	v
Abstrak	vi
<i>Abstract</i>	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xii
Daftar Singkatan	xv
Daftar Tabel	xvi
Daftar Gambar	xvii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	20
C. Rumusan Masalah	23
D. Tujuan Penelitian	24
E. Kegunaan Penelitian	24
F. Kerangka Pemikiran	25
1. Landasan Teori	25
a. Teori Demokrasi	26
b. Teori Konstitusi	38
c. Teori Otonomi Daerah	47
d. Teori Lembaga Perwakilan	50
e. Teori Kewenangan	56
f. Teori Kemanfaatan	58
2. Landasan Konseptual	60
G. Metode Penelitian	63

1. Jenis Penelitian.....	63
2. Pendekatan Penelitian	64
3. Spesifikasi Penelitian.....	65
4. Sumber Data.....	66
5. Teknik Pengumpulan Data.....	68
6. Teknik Analisis data	69
7. Lokasi Penelitian.....	69
H. Orisinalitas Penelitian	70
Bab II Konstruksi Hubungan DPD RI dengan Pemerintahan Daerah	72
A. Perkembangan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah.....	72
1. Sebelum Perubahan UUD NRI Tahun 1945.....	72
2. Sesudah Perubahan UUD NRI Tahun 1945.....	116
B. Kelahiran dan Perkembangan DPD RI	143
C. Konstruksi DPD RI dengan Pemerintahan Daerah saat ini.....	164
Bab III. Bentuk Ideal Hubungan Lembaga Perwakilan dengan Pemerintahan Daerah pada Negara Lain.....	182
A. Model Amerika Serikat.....	182
1. Sistem Pemerintahan.....	182
2. Sistem Parlemen	191
3. Model hubungan lembaga perwakilan (parlemen) dengan pemerintahan daerah	194
B. Model Belanda	203
1. Sistem Pemerintahan	203
2. Sistem Parlemen	204
3. Model hubungan lembaga perwakilan (parlemen) dengan pemerintahan daerah	214
C. Model Inggris.....	216
1. Sistem Pemerintahan	216
2. Sistem Parlemen	218
3. Model hubungan lembaga perwakilan (parlemen) dengan pemerintahan daerah	

	223
Bab IV. Rekonstruksi Hubungan DPD RI dengan Pemerintahan Daerah	228
A. Analisa Desentralisasi dan Hubungan Pusat-Daerah	228
1. Pola Pembagian Urusan Pemerintahan	228
2. Tumpang Tindih Kewenangan Pusat-Daerah	246
3. Hadirnya DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah	293
4. DPD RI dalam hubungan pusat-daerah	299
B. Analisa Penataan dan Optimalisasi Hubungan DPD RI dengan Pemerintahan Daerah	310
C. Analisa Pola Dukungan bagi DPD RI untuk Mengoptimalkan Kinerja Khususnya Hubungan dengan Pemerintahan Daerah	344
Bab V. Penutup	352
A. Kesimpulan	352
B. Saran	356
Daftar Pustaka	363
Daftar Riwayat Hidup	376

DAFTAR SINGKATAN

DPD RI	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
MK	Mahkamah Konstitusi
MPR RI	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pemda	Pemerintahan Daerah
UUD	Undang-Undang Dasar (konstitusi secara umum)
UUD NRI Tahun 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbandingan Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014	9
Tabel 2.	Perbandingan Model Demokrasi Menurut Arend Lijphart	37
Tabel 3.	Perbandingan UU Nomor 5 Tahun 1974 dan UU Nomor 22 Tahun 1999 (data diolah)	105
Tabel 4.	Proses Legislasi Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945	160
Tabel 5.	Besarnya Dana yang Masuk ke Desa dari Berbagai Sumber dan Diperlukan Koordinasi	315



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Hubungan DPD RI dengan MPR RI, DPR RI, dan Presiden	15
Gambar 2.	Pendulum Arah Demokrasi Menurut Collier dan Levitsky	35
Gambar 3.	Fungsi Parlemen Inggris	225
Gambar 4.	Distribusi Urusan Pemerintahan (Negara Kesatuan dan Negara Federal)	241
Gambar 5.	Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah ...	245
Gambar 6.	Angka Partisipasi Murni Pendidikan	249
Gambar 7.	Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2021	251
Gambar 8.	Kualitas Sanitasi	253
Gambar 9.	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	254
Gambar 10.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	255
Gambar 11.	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	256
Gambar 12.	Kinerja Daerah dalam Pengelolaan Irigasi	258
Gambar 13.	Besarnya Dana yang Masuk ke Desa dari Berbagai Sumber dan Diperlukan Koordinasi	314
Gambar 14.	Kenaikan Dana Transfer (Perimbangan)	316
Gambar 15.	Indeks Rasio Gini Provinsi Indonesia 2016	317
Gambar 16.	Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Sistem Desentralisasi	320

ABSTRAK

Judul Disertasi : REKONSTRUKSI HUBUNGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD RI) DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Kata Kunci : Lembaga Legislatif, Parlemen, Pemerintahan Daerah.

Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI lahir dari gagasan untuk mengubah sistem perwakilan menjadi sistem perwakilan dua kamar (bikameral dalam hubungan legislasi) dan meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan pengelolaan negara. Konsep ideal keberadaan DPD RI tersebut, pada awalnya juga bermaksud untuk mengakomodir prinsip perwakilan daerah dan pemberdayaan daerah. Tentunya DPD RI sebagai wakil daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya tidak dapat sendiri dan memerlukan koordinasi yang efektif dengan Pemerintahan Daerah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif di daerah. Secara empiris, konstruksi hubungan DPD RI dengan pemerintah daerah saat ini belum optimal. Salah satu kewajiban DPD RI untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan kepentingan daerah masih dilakukan secara normatif dan belum efektif. Hal ini tentunya sangat tidak ideal sebagaimana konstruksi Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 22D, dan Pasal 23 UUD 1945 yang saling berkait. Dimana kehadiran DPD (melalui kewenangan DPD dalam Pasal 22D) sebagai lembaga perwakilan daerah perlu untuk menjaga eksistensi daerah (Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B). DPD RI juga perlu hadir dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya, khususnya dalam rangka mewujudkan keadilan dan keselarasan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab. Konteks tersebut mendorong peneliti untuk melakukan pengajian atas permasalahan: 1) apakah konstruksi DPD RI dengan Pemerintahan Daerah sudah memadai? 2) bagaimana bentuk ideal hubungan lembaga perwakilan dengan pemerintahan daerah pada negara lain? dan 3) bagaimana rekonstruksi hubungan antara DPD RI dan Pemerintahan Daerah?.

Berdasarkan temuan penelitian, menjadi penting untuk direkomendasikan secara umum bahwa pemerintah pusat bersama DPR RI dan DPD RI perlu memikirkan pengaturan khusus berupa penegasan kewenangan desentralisasi dan hubungan pusat-daerah yang efektif. Sementara secara khusus dalam rangka rekonstruksi hubungan DPD RI dengan pemerintahan daerah, maka perlu ada rekonstruksi fungsi pengawasan dan anggaran DPD RI yang berdampak langsung pada masyarakat dan daerah; optimalisasi fungsi yang telah ada, seperti fungsi pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda, serta fungsi pemantauan dan peninjauan undang-undang untuk harmonisasi hukum pusat-daerah; dan perlu adanya pola dukungan bagi DPD RI untuk mengoptimalkan kinerjanya.

ABSTRACT

Title Disertation : *RELATIONSHIP RECONSTRUCTION THE HOUSE OF REGIONAL REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (DPD RI) WITH LOCAL GOVERNMENTS IN THE FRAMEWORK OF THE UNITARY STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA.*

Keywords : *Legislative Institution, Parliament, Local Government.*

As a regional representative institution, the DPD RI was born from the idea of changing the representative system into a bicameral representative system (bicameral in legislative relations) and increasing regional participation in the course of politics and state management. The ideal concept of the existence of the DPD RI was initially also intended to accommodate the principle of regional representation and regional empowerment. Of course, the DPD RI as a regional representative in carrying out its duties and functions cannot be alone and requires effective coordination with the Regional Government as the executor of executive power in the region. Empirically, the construction of the relationship between the DPD RI and the regional government is currently not optimal. One of the obligations of the DPD RI to absorb and follow up on regional aspirations and interests is still carried out normatively and is not yet effective. This is certainly very less than ideal as the construction of Article 18, Article 18A, Article 18B, Article 22D, and Article 23 of the 1945 Constitution which are interrelated. Where the presence of the DPD (through the authority of the DPD in Article 22D) as a regional representative institution is necessary to maintain the existence of the region (Article 18, Article 18A, and Article 18B). The DPD RI also needs to be present in carrying out its constitutional obligations, especially in order to realize justice and harmony in the implementation of responsible regional autonomy.

This context encourages researchers to conduct studies on the following issues: 1) is the construction of the DPD RI with the Regional Government adequate? 2) what is the ideal form of the relationship between representative institutions and regional governments in other countries? and 3) how is the reconstruction of the relationship between the DPD RI and the Regional Government?

Based on the research findings, it is important to recommend in general that the central government together with the DPR RI and DPD RI need to consider special arrangements in the form of affirmation of decentralization authority and effective central-regional relations. Meanwhile, specifically in the context of reconstructing the relationship between the DPD RI and regional governments, there needs to be a reconstruction of the DPD RI's supervisory and budget functions that have a direct impact on the community and regions; optimization of existing functions, such as the function of monitoring and evaluating draft regional regulations and regulations, as well as the function of monitoring and reviewing laws for the harmonization of central-regional laws; and there needs to be a pattern of support for the DPD RI to optimize its performance.